



RENJAN MURNI

2025

**Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

BAB I..... 2

PENDAHULUAN 2

 1.1. Latar Belakang..... 2

 1.2. Landasan Hukum 4

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II 9

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 30

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 33

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62

BAB III..... 63

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63

 3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional 64

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 67

 3.3. Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
 68

BAB IV 74

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 74

BAB V 92

PENUTUP..... 92

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan aparatur BKAD Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dengan harapan implementasi perencanaan kerja dapat mencapai target pembangunan yang optimal.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM
NIP. 19731102 199901 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan 1

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten

Purwakarta Tahun 2025 dan Renstra Perangkat BKAD Tahun 2024-2026;

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ini menyajikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD (akhir periode renstra PD)	Realisasi Outcome Program dan Output Kegiatan sd Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan fungsi penunjang									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			A	A	100%	A		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan		10 Dokumen				10 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun								
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	5 Laporan		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Perangkat Daerah							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44 Dokumen				44 Dokumen	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		52 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	100%	83 Orang/Bulan	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	2 Laporan	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	18 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada		6 Dokumen				6 Dokumen	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		perangkat daerah								
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	4 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun		4 Dokumen				4 Dokumen		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	3 Orang		
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	350 Orang	350 Orang	100%	150 Orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		0	0	0	0	100 Orang		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah		25 Paket				25 Paket		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		3 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	-	3 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Disediakan								
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		101 Unit				83 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	2 Unit	-	-	2 Unit		
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		73 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	40 Unit		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	40 Unit		
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan				36 Laporan		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	46 Unit				86 Unit		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	5 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	5 Unit		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit	22 Unit	22 Unit	-	30 Unit			
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28 Unit	106 Jenis	106 Jenis	100%	45 Unit			
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 unit			
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	2 Unit			

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		litasi								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		-	-	-	-	15			
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		-	-	-	-	85			
	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	100%	WTP			
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		-	-	-	-	75.54			
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		-	-	-	-	2.13			
	Persentase SILPA terhadap APBD		-	-	-	-	1.74			
	Persentase belanja pendidikan (20%)		-	-	-	-	32			
	Persentase belanja kesehatan (10%)		-	-	-	-	21			
	Bagi hasil kabupaten/kota dan		-	-	-	-	1.80			

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		desa								
		Penetapan APBD		-	-	-	-	Tepat Waktu		
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran		-	-	-	-	6		
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD		-	-	-	-	20		
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	8		
		Penyerapan Anggaran		-	-	-	-	20		
		Kondisi Keuangan Daerah		-	-	-	-	4		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		23 Dokumen				23 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	4 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	4 Dokumen		
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan		50 Dokumen				52 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Daerah								
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		14 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	14 Dokumen		
	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		20 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam		-	-	-	-	2 Laporan		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	12 Dokumen		
	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupate/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		4 Dokumen				4 Dokumen		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Pemerintah Daerah								
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun		4 Dokumen				4 Dokumen		
	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		204 Laporan	204 Laporan	204 Laporan	100%	204 Laporan		
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		183 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	183 Laporan		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah		2 Dokumen				2 Dokumen		
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Daerah								
	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		100 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	115 Orang		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)		-	-	-	-	YA		
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal		-	-	-	-	100%		
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat		-	-	-	-	25%		
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	70%		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Persentase pengolah BMD yang dibina		-	-	-	-	100%		
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD		-	-	-	-	100%		
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif		-	-	-	-	3 (Baik)		
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	3 (Baik)		
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif		-	-	-	-	3 (Baik)		
		Administrasi BMD yang Andal		-	-	-	-	3 (Baik)		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah		17 Dokumen				19 Dokumen		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		90 Orang				100 Orang		
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	1 Laporan		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		85 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 2 sasaran strategis pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan yang kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah” yang diukur melalui 4 (Empat) indikator sasaran.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra	Perkiraan Realisasi Capaian	Rasio Capaian
					2024	2024	2024
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				A		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				Baik		
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				Baik		
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah				Baik		

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
 - a. Proses integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan sehingga proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD masih terdapat banyak permasalahan sehingga masih menggunakan aplikasi yang lama (SIMDA).
 - b. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (Standard Operating Procedure). Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perlu disempurnakan seiring dengan terbitnya peraturan baru. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan BKAD.
 - c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi. Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi. Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam penyajian sistem informasi keuangan daerah.

- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
 - a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan

mobilitas personil sangat tinggi. Sarana dan Prasarana dirasa kurang memadai.

- b. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah. Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap PD. Sehingga di setiap PD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak cara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
 - c. Pensertifikatan aset tetap tanah masih belum optimal.
- 3) Belum optimalnya penataan arsip/dokumen. Kurang representatifnya tempat penyimpanan arsip/dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan;
 - 4) Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih terbatas. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan maupun barang di setiap PD se Kabupaten Purwakarta;
 - 5) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Masih kurangnya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara periodik. Masih adanya keterlambatan penyusunan SPJ SKPD maksimal 10 hari pada bulan berikutnya. Namun untuk penyusunan Buku Kas Umum dapat dilaksanakan tepat waktu;
 - 6) Masih kurang tertibnya pelaporan realisasi keuangan dan laporan pajak pusat/daerah dari SKPD.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan di atas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
- 3) Optimalisasi fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja;
- 5) Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- 6) Penyempurnaan sistem aplikasi dan database pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya;
- 7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika;
- 8) Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Badan keuangan dan Aset Daerah harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Badan keuangan dan Aset Daerah yang tercantum di dalam RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah karena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025.

Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3 Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 2. 3
Review terhadap RKPd Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	10 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	10 Dokumen		
Penyusunan Dokumen	Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	25.000.000	Penyusunan Dokumen	Kab.	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Perangkat Daerah	Dokumen		Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Perencanaan Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	15.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	50,045,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	50,045,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/Bulan	50.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/Bulan	50.000.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	15.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Dokumen	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Dokumen	20.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	300.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndan	150 Orang	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUnda	150 Orang	75.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	75.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	25 Paket	1.145.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	25 Paket	1.145.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	60.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	300.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	300.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2 Dokumen	75.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

							pada SKPD			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	150.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	150.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	86 Unit	850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	86 Unit	850.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	150.000.000	
Pengadaan Peralatan	Kab.	Jumlah Unit Peralatan dan	45 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan	Kab.	Jumlah Unit Peralatan dan	45 Unit	200.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Mesin Lainnya yang Disediakan			dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Mesin Lainnya yang Disediakan			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	200.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.383.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.383.000.000	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.178.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.178.000.000	0

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	96 Unit	900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	96 Unit	900.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				374,666,502,002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				374,666,502,002	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15%				Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15%		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	85%				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	85%		
		Opini Laporan Keuangan	WTP				Opini Laporan Keuangan	WTP		
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	75.54%				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	75.54%		
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.13%				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.13%		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Persentase SILPA terhadap APBD	1.74%				Persentase SILPA terhadap APBD	1.74%		
		Persentase belanja pendidikan (20%)	32%				Persentase belanja pendidikan (20%)	32%		
		Persentase belanja kesehatan (10%)	21%				Persentase belanja kesehatan (10%)	21%		
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1.80%				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1.80%		
		Penetapan APBD	TEPAT WAKTU				Penetapan APBD	TEPAT WAKTU		
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	6				Kesesuaian Dokumen Penganggaran	6		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	20				Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	20		
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8		
		Penyerapan Anggaran	20				Penyerapan Anggaran	20		
		Kondisi Keuangan Daerah	4				Kondisi Keuangan Daerah	4		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23 Dokumen	2.350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23 Dokumen	2.350.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	250.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	250.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	175.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	175.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	75.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	4 Dokumen	500.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Daerah tentang Penjabaran APBD		Penjabaran APBD			Daerah tentang Penjabaran APBD		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	500.000.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	52 Dokumen	840.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	52 Dokumen	840.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14 Dokumen	125.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14 Dokumen	125.000.000	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	100.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	100.000.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	125.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	125.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	2 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	2 Laporan	50.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan	12 Dokumen	125.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	12 Dokumen	125.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Instansi Terkait					Atas SP2D dengan Instansi Terkait			
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	140.000.000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	720.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4 Dokumen	720.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

							Daerah			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	70.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	70.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis	1 Dokumen	50.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	370,456,502,002	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	370,456,502,002	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204 Laporan	305.000.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204 Laporan	305.000.000.000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	23.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	23.000.000.000	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Kab.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	183	42,456,502,0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Kab.	Jumlah Laporan Hasil	183	42,456,502,0	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kabupaten/Kota	Purwakarta	Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	02	Kabupaten/Kota	Purwakarta	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	02
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	2 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	2 Dokumen	300.000.000
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	150.000.000
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	117 Orang	150.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	117 Orang	150.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.150.000.00 0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.150.000.00 0	
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	100%				Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	100%		
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	25%				Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	25%		
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	70%				Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	70%		
		Persentase pengolah BMD yang dibina	100%				Persentase pengolah BMD yang dibina	100%		
		Persentase penyusutan/ penghapusan	100%				Persentase penyusutan/ penghapusan	100%		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		BMD					BMD			
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	3 (Baik)				Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	3 (Baik)		
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 (Baik)				Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	3 (Baik)		
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	3 (Baik)				Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	3 (Baik)		
		Administrasi BMD yang Andal	3 (Baik)				Administrasi BMD yang Andal	3 (Baik)		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik	19 Dokumen	2.150.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan	19 Dokumen	2.150.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Daerah					Barang Milik Daerah			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		
Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	50.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	150.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	200.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	200.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	700.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	700.000.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	300.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	300.000.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	100.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	100.000.000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik	2 Laporan	150.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik	2 Laporan	150.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Daerah yang Disusun					Daerah yang Disusun			
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Akan tetapi selaku PPKD, BKAD menganggarkan usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah yang diusulkan oleh dinas - dinas terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan primaserta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang Optimal;
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali;
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program/kegiatan).

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini;

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik

3.3 Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di BKAD Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2025 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini memiliki kegiatan dan Sub Kegiatan :

✚ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

✚ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

✚ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- ✚ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- ✚ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- ✚ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Mebel;
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- ✚ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- ✚ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini memiliki kegiatan dan Sub Kegiatan :

- ✚ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

- d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- ✚ Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan
 - e) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
 - g) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- ✚ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✚ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- ✚ Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
 - b) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program ini memiliki Indikator Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD dan Persentase pengelola asset OPD yang dibina dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

✚ Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Standar Harga;
- b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- f) Pengamanan Barang Milik Daerah;
- g) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- h) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- i) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- j) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.02	Keuangan							
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				55.723.000.000			58.509.150.000
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah		A			A	
5.02.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		10 Dokumen	80.000.000		10 Dokumen	84.000.000
5.02.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	25.000.000		2 Dokumen	26.250.000
5.02.01.2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab.	1	10.000.000		1	10.500.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKASKPD	Purwakarta	Dokumen			Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	10.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	2 Laporan	15.000.000		2 Laporan	15.750.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	5 Laporan	20.000.000		5 Laporan	21.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	44 Dokumen	50.045.000.000		44 Dokumen	52.547.250.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	83 Orang/Bulan	50.000.000.000		83 Orang/Bulan	52.500.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	12 Dokumen	15.000.000		12 Dokumen	15.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	2 Laporan	20.000.000		2 Laporan	21.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	18 Laporan	10.000.000		18 Laporan	10.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Purwakarta	6 Dokumen	20.000.000		6 Dokumen	21.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	10.000.000		2 Dokumen	10.500.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	4 Laporan	10.000.000		4 Laporan	10.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	300.000.000		4 Dokumen	315.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta	2 Paket	100.000.000		2 Paket	105.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta	5 Orang	50.000.000		5 Orang	52.500.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	dan Fungsi							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kab. Purwakarta	150 Orang	75.000.000		150 Orang	78.750.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	100 Orang	75.000.000		100 Orang	78.750.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Purwakarta	25 Paket	1.145.000.000		25 Paket	1.202.250.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	2 Paket	50.000.000		2 Paket	52.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta	3 Paket	60.000.000		3 Paket	63.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	5 Paket	250.000.000		5 Paket	262.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Paket	300.000.000		10 Paket	315.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	10.000.000		3 Dokumen	10.500.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	12 Laporan	50.000.000		12 Laporan	52.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	200.000.000		12 Laporan	210.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	75.000.000		2 Dokumen	78.750.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	12 Dokumen	150.000.000		12 Dokumen	157.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Purwakarta	86 Unit	850.000.000		86 Unit	892.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Unit	300.000.000		1 Unit	315.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta	40 Unit	150.000.000		40 Unit	157.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta	45 Unit	200.000.000		45 Unit	210.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Purwakarta	0 Unit	200.000.000		0 Unit	210.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	36 Laporan	2.383.000.000		36 Laporan	2.502.150.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	12 Laporan	5.000.000		12 Laporan	5.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	200.000.000		12 Laporan	210.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	2.178.000.000		12 Laporan	2.286.900.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	96 Unit	900.000.000		96 Unit	945.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	5 Unit	100.000.000		5 Unit	105.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purwakarta	35 Unit	100.000.000		35 Unit	105.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Lapangan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	50 Unit	100.000.000		50 Unit	105.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	400.000.000		2 Unit	420.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	100.000.000		2 Unit	105.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	100.000.000		2 Unit	105.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kab. Purwakarta		374.666.502.002			393.399.827.102
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Kab. Purwakarta	15%			15%	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Kab. Purwakarta	85%			85%	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Opini Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	WTP			WTP
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Kab. Purwakarta	75.54%			75.54%
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Kab. Purwakarta	2.13%			2.13%
		Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Purwakarta	1.74%			1.74%
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Kab. Purwakarta	32%			32%
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Kab. Purwakarta	21%			21%
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Kab. Purwakarta	1.80%			1.80%
		Penetapan APBD	Kab. Purwakarta	TEPAT WAKTU			TEPAT WAKTU
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Kab. Purwakarta	6			6
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Kab.	20			20

RENCANA KERJA TAHUN 2025

			Purwakarta					
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	8			8	
		Penyerapan Anggaran	Kab. Purwakarta	20			20	
		Kondisi Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	4			4	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Purwakarta	23 Dokumen	2.350.000.000		23 Dokumen	2.467.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	200.000.000		4 Dokumen	210.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	200.000.000		4 Dokumen	210.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	250.000.000		2 Dokumen	262.500.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen	262.500.000
	Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab.	2	175.000.000		2	183.750.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Verifikasi DPA-SKPD		Purwakarta	Dokumen			Dokumen	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	78.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	500.000.000		4 Dokumen	525.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	500.000.000		4 Dokumen	525.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	210.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Purwakarta	52 Dokumen	840.00.000		52 Dokumen	882.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Kab.	14	125.000.000		14	131.500.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Daerah	Pengelolaan Kas Daerah	Purwakarta	Dokumen			Dokumen	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	100.000.000		3 Dokumen	105.000.000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Purwakarta	20 Dokumen	125.000.000		20 Dokumen	131.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Purwakarta	2 Laporan	50.000.000		2 Laporan	52.500.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kab.	12	125.000.000		12	131.500.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Purwakarta	Dokumen			Dokumen	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	140.000.000		1 Dokumen	147.000.000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	100 Orang	175.000.000		100 Orang	183.750.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	720.000.000		4 Dokumen	756.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Purwakarta	1 Laporan	70.000.000		1 Laporan	73.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Kab.	2	600.000.000		2	630.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Purwakarta	Dokumen			Dokumen	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	52.500.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	Kab. Purwakarta	4 Dokumen	370.456.502.002		4 Dokumen	388.979.327.102
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwakarta	204 Laporan	305.000.000.000		204 Laporan	320.250.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwakarta	12 Laporan	23.000.000.000		12 Laporan	24.150.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	183 Laporan	42.456.502.002		183 Laporan	44.579.327.102
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	300.000.000		2 Dokumen	315.000.000
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	157.500.000
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	117 Orang	150.000.000		117 Orang	157.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Kab. Purwakarta		2.150.000.000			2.257.500.000
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Kab. Purwakarta	100%			100%	
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Kab. Purwakarta	25%			25%	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	70%			70%
		Persentase pengolah BMD yang dibina	Kab. Purwakarta	100%			100%
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Kab. Purwakarta	100%			100%
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Kab. Purwakarta	3 (Baik)			3 (Baik)
		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	3 (Baik)			3 (Baik)
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Kab. Purwakarta	3 (Baik)			3 (Baik)
		Administrasi BMD yang Andal	Kab. Purwakarta	3 (Baik)			3 (Baik)

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	19 Dokumen	2.150.000.000		19 Dokumen	2.257.500.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	100 Orang			100 Orang	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	210.000.000
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	150.000.000		2 Dokumen	157.500.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	50.000.000		2 Dokumen	52.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	1 Laporan	150.000.000		1 Laporan	157.500.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	210.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	1 Laporan	700.000.000		1 Laporan	735.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	300.000.000		5 Dokumen	315.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah						
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	4 Laporan	100.000.000		4 Laporan	105.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Purwakarta	2 Laporan	150.000.000		2 Laporan	157.500.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	100 Orang	150.000.000		100 Orang	157.500.00

BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Renja BKAD Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKAD. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKAD Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staff BKAD Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025.

